

Dari Soal Sekprov dan Mendorong Orang Kaltim

Ditulis oleh Administrator
Senin, 13 Juli 2009 14:17

150 Hari Pertama Gubernur Baru Kaltim

Catatan: Dahlan Iskan

APA yang sudah dilakukan gubernur baru Kaltim, H Awang Faroek Ishak, di 150 hari pertama masa pemerintahannya yang jatuh pada hari ini?

Sebelum menjawab, barangkali perlu disampaikan: mengapa 150 hari? Bukan 100 hari?

Rupanya perjalanan hari begitu cepat sehingga 100 hari pertama lewat begitu saja tanpa ada yang mempersoalkan. Tapi ada juga baiknya pertanyaan itu disampaikan untuk menandai 150 harinya dan bukan 100 harinya. Penandaan 100 hari adalah terlalu berbau Amerika. Mungkin kurang baik bagi kita. Apalagi 100 hari, dalam budaya kita, adalah penandaan untuk orang meninggal dunia. Kalau 150 hari kan bisa cocok dengan budaya kita: lebih toleran terhadap molornya waktu. Artinya, janganlah ditanyakan apa yang sudah dikerjakan selama 100 hari pertama di Kaltim, karena pertanyaan seperti itu sama saja menghina Amerika. Masak Kaltim bisa secepat Amerika.

Lalu, apa yang sudah dilakukan gubernur baru dalam 150 hari pertama masa jabatannya?

Tentu sudah ada. Misalnya, mulai melakukan mutasi di kalangan pejabat kantor gubernur. Bahwa penataan itu belum menyentuh lapisan tertinggi, Sekretaris Provinsi (Sekprov), bisa saja ada dua kemungkinan: gubernur masih terus berpikir mencari cara menggantinya, atau mungkin juga sudah merasa pas dengan pejabat lama sehingga tidak perlu diganti. Dua-duanya sah-sah saja.

Hanya saja, kalau sudah 150 hari belum menata bagian itu mestinya harus ada penjelasan dari gubernur bahwa sekprov memang tidak akan diganti. Kan boleh saja tidak mengganti sekprov. Itu wewenang gubernur sepenuhnya. Yang diperlukan adalah kepastiannya.

Ini penting mengingat dalam budaya birokrasi banyak hal bisa membuat ragu. Kata “tunggu saja siapa yang akan diangkat” sering bisa menjadi alasan mengapa sebuah program berjalan lambat. Kepastian sekprov diganti atau tidak, baiknya sudah dilakukan dalam 100 hari pertama masa pemerintahannya untuk memberikan kepastian pada jajaran di bawahnya. Membuat sikap jajaran birokrasi dalam keadaan menunggu sangatlah bisa ditafsirkan bahwa semuanya akan berjalan lambat nantinya.

Dari gambaran di atas masyarakat pun akan menarik kesimpulan bahwa program-program lainnya nanti pasti juga akan berjalan lambat. Sebab banyak program yang untuk bisa berjalan memerlukan birokrasi yang sudah mantap. Bukan birokrasi yang secara psikologis masih merasa dalam masa transisi.

Dari sinilah rupanya mengapa masyarakat balik bertanya setiap kali ditanya mengenai apa yang sudah dilakukan gubernur baru dalam 150 hari masa jabatannya ini. “Iya ya? Apa ya? Sudah mengerjakan apa saja ya?,” begitulah umumnya jawaban yang diberikan kepada saya.

Dari Soal Sekprov dan Mendorong Orang Kaltim

Ditulis oleh Administrator
Senin, 13 Juli 2009 14:17

Saya tidak akan membandingkan dengan Amerika, di mana presiden Obama dalam 100 hari pertamanya sudah membuat keputusan yang begitu banyak dan penting. Saya hanya akan membandingkannya dengan Jatim. Dalam 100 hari pertama masa jabatan Gubernur Soekarwo langsung muncul berita besar: seluruh jalan provinsi di Jatim sudah tidak ada yang berlubang. Konkret, dirasakan dan menyentuh kepentingan orang banyak dalam waktu yang segera. Lalu sudah dibuat keputusan besar lainnya: kalau sampai Juni ini tidak ada kepastian pembebasan lahan untuk jalan tol, mengganti jalan tol yang terkena lumpur Lapindo, maka dia akan tabrak semua penghalangnya. Rumah-rumah yang ada akan ditabrak dengan alat-alat berat. Bahkan masih di hari yang sama, ribuan bangunan liar (banyak yang sudah dalam bentuk rumah permanen yang bagus) di sepanjang setren sungai Wonokromo dibersihkan.

Tentu juga tidak fair membandingkannya dengan Jatim. Jatim, wilayahnya terbatas dan dekat dengan Jakarta. Sedang Kaltim begitu jauh sehingga gubernur yang harus pergi ke Jakarta tidak bisa pulang sore harinya. Ini bisa membuat waktu gubernur banyak di Jakarta. Apalagi kalau ke Jakartanya harus sering-sering.

Barangkali boleh juga dimasukkan dalam catatan bahwa “sudah sering ke Jakarta” sebagai salah satu yang sudah diperbuat gubernur Kaltim dalam 150 hari pertama masa jabatannya. Misalnya untuk memperjuangkan banyak hal yang diperlukan Kaltim.

Hal lain yang perlu dicatat adalah “sudah melakukan konsolidasi”. Contohnya: sudah minta kepada para bupati untuk meningkatkan keadaan bandara masing-masing. Atau sudah minta agar kelak di setiap sekolah didirikan kantin kejujuran. Atau sudah mulai mendesak agar ada investasi baru listrik di Kaltim dan mulai mencari investor untuk jalan tol Balikpapan-Samarinda-Sengata.

Tapi semua itu bentuknya pidato. Dan gubernur baru, kalau berpidato memang bisa panjang untuk menguraikan perlunya semua itu dilaksanakan dengan segera. Bahkan para stafnya sudah mulai bisa menandai kapan pidato gubernur akan berakhir. Yakni kalau sudah sampai pada uraian mengenai kehebatan rencana Pelabuhan Maloi di Kutai Timur plus kawasan industri majunya. Kalau pidatonya belum sampai ke soal itu, jangan harap akan selesai, meskipun sudah lebih dari 1 jam.

Tentu itu juga harus dicatat sebagai hal yang sudah dilakukannya selama 150 hari pertama masa jabatannya.

Hari rupanya akan terus berjalan dengan cepat. Persiapan yang lambat akan membuat sebuah start yang juga lambat. Start yang lambat pasti akan membuat penyelesaian yang juga lambat. Start untuk mengatasi banjir di Samarinda, misalnya, belum dimulai. Bahkan keburu Samarinda banjir besar seminggu, ketika masa jabatan guberur baru saja melewati 100 hari. Rumah saya ikut tenggelam. Padahal salah satu dari 10 janji utama kampanyenya adalah mengatasi banjir di Samarinda – meski sebetulnya biarlah itu tanggung jawab wali kota Samarinda.

Melihat semua itu, saya usul agar gubernur jangan malu merevisi janji-janji kampanyenya. Kita akan memaafkannya. Janji membangun jalan tol yang begitu spektakuler, misalnya, rasanya akan sulit direalisasikan. Akan terlalu banyak energi yang terbuang di sini. Jangankan

Dari Soal Sekprov dan Mendorong Orang Kaltim

Ditulis oleh Administrator
Senin, 13 Juli 2009 14:17

membangun jalan tol di Kaltim, membangun di Jawa saja banyak investor yang mundur-maju. Apalagi kalau yang diandalkan adalah investor dari Timur Tengah. Timur Tengah sendiri sekarang lagi sulit. Negara seperti Dubai harus di-bailout oleh tetangganya. Proyek-proyek besar mereka sendiri banyak yang tidak jelas nasibnya.

Demikian juga program Kaltim Airlines. Itu hanya akan kelihatan gagah tapi bukan main sulitnya dalam mengelola secara baik. Akibatnya hanya akan menimbulkan beban yang panjang.

Menurut saya akan lebih konkret kalau gubernur bisa mempercepat pembangunan bandara Samarinda. Lalu orang-orang Bontang dan Sengata bisa ikut memanfaatkannya. Demikian juga mengatasi persoalan pelabuhan Samarinda akan lebih nyata hasilnya. Termasuk bisa untuk back-up kalau-kalau jalan raya Balikpapan-Samarinda putus.

Gubernur baru, menurut pendapat saya, bisa mengatasi banyak hal berdasar kemampuan yang ada di Kaltim sendiri. Daripada terlalu banyak waktu yang dibuang untuk merayu orang dari luar yang komitmennya pada daerah belum tentu tinggi. Listrik, bandara, pelabuhan, banjir Samarinda, jalan-jalan tembus pasti bisa dilakukan oleh orang Kaltim sendiri, sepanjang mereka diminta, didorong, diberi perhatian dan seterusnya.

Zaman sudah berubah. Masyarakat akan terus mencatat apa yang akan dilakukan pemimpinnya. Meskipun mungkin hanya dicatat di dalam hatinya.(*) Sumber : Kaltimpost, 30-05-2009